

Bantuan Jepang Untuk Timor Lorosa'e

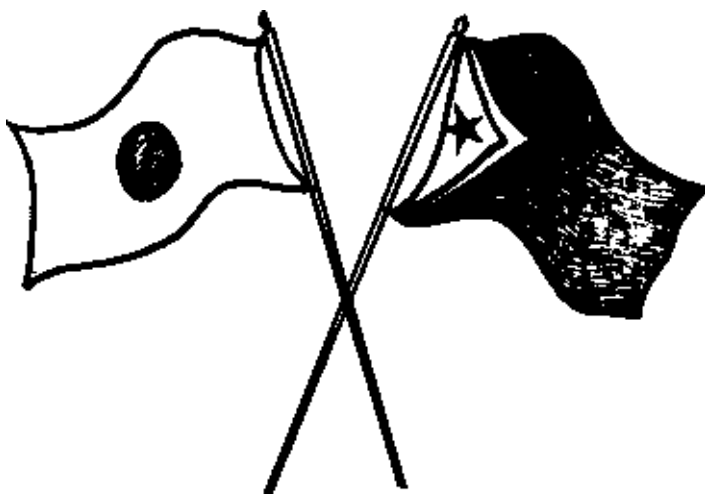
Jepang adalah negara terkaya di Asia dan negara terkaya kedua di dunia. Sejak awal dasawarsa 1970-an, Jepang telah menjadi sebuah kekuatan ekonomi global utama, menentang dominasi Amerika Serikat atas penanaman modal dan pasar global. Jepang adalah salah satu dari lima negara penyumbang terbesar kepada IMF dan Bank Dunia. Dengan begitu Jepang mempunyai andil terbesar ke dua lembaga keuangan internasional tersebut. Jepang juga merupakan kekuatan regional terbesar di Bank Pembangunan Asia (ADB, Asia Development Bank), kekuasaannya sama besar dengan Amerika Serikat, salah satu negara anggota ADB yang bukan terletak di Asia.

Jepang juga merupakan salah satu donor terbesar di dunia dan telah menjadi penyumbang terbesar bantuan multilateral dan bilateral ke Timor Lorosa'e sejak bulan September 1999. Pemerintah Jepang menyumbangkan US\$30 juta dalam bantuan kemanusiaan selama masa darurat setelah referendum. Sebagian besar uang tersebut disalurkan melalui badan-badan multilateral seperti Program Pangan Dunia (WFP, World Food Programme) dan Komisi Tinggi Urusan Pengungsi PBB (UNHCR), Permohonan Gabungan PBB, permohonan Komite Palang Merah Internasional, dan NGO-NGO Jepang. Pada bulan Desember 1999 pada Konferensi Donor untuk Timor Lorosa'e, Jepang menjanjikan US\$100 juta untuk rehabilitasi dan pembangunan Timor Lorosa'e

untuk periode tiga tahun lebih. 90% janji pertama ini telah diberikan. Pada konferensi terakhir donor untuk Timor Lorosa'e yang diadakan di Dili seminggu sebelum perayaan kemerdekaan, Jepang menjanjikan tambahan bantuan US\$50 juta lebih untuk tiga tiga tahun mendatang.

Sementara Timor Lorosa'e memang berhak pada tingkat bantuan keuangan ini dari anggota masyarakat internasional, penting untuk memeriksa beberapa pengaruh bantuan Jepang yang dapat berpengaruh pada pembangunan Timor Lorosa'e di masa depan. Tulisan ini akan menempatkan bantuan Jepang ke Timor Lorosa'e dalam konteks bantuan Jepang ke negara-negara lain. Tulisan pertama akan menjelaskan bagaimana pemerintah Jepang menentukan bantuan, dan melihat beberapa cara di dalam struktur bantuan yang dikaitkan dengan kondisi ekonomi Jepang. Artikel ini juga akan menguji hubungan antara pemerintah Jepang dengan Timor Lorosa'e dengan mengkhhususkan pada perhatian terhadap rehabilitasi infrastruktur di Timor Lorosa'e. Dua artikel yang berkaitan dalam edisi ini: satu laporan (halaman 8) perjanjian rehabilitasi tenaga listrik di Timor Lorosa'e, sebuah proyek di mana bantuan Jepang telah menyumbangkan cukup banyak dana dan satu artikel (halaman 5) perjanjian dengan kehadiran Pasukan Bela Diri Jepang di Timor Lorosa'e.

(Bersambung ke halaman 2)



Di dalam . . .

Pasukan Penjaga Perdamaian Jepang	5
Promete husi Nasaun Doadores	7
Laporan Khusus Tentang Listrik	8
Siapa itu La' o Hamutuk?	11
Konferensi Minyak	12
Berita Singkat	14
Apa itu La' o Hamutuk?	16
Editorial: Rencana Pembangunan Nasional	16

La' o Hamutuk, Institut Pemantau dan Analisis Rekonstruksi Timor Lorosa'e

P.O. Box 340, Dili, East Timor (via Darwin, Australia)

Mobile: +61(408)811373; Telepon: +670(390)325-013

Email: laohamutuk@easttimor.minihub.org Situs/Web: <http://www.etan.org/lh>

Bantuan Jepang – Sebuah Definisi

Jepang saat ini merupakan donor terbesar di dunia. Walaupun memberikan bantuan dolar lebih besar dibandingkan negara-negara lain, dana ini hanya mewakili sejumlah kecil dari presentase kekayaan Jepang yang sesungguhnya. Pada tahun 2000 Jepang memberikan 0,27% produk domestik bruto (GNP, Gross National Product) ke negara-negara lain sebagai bantuan pembangunan luar negeri, jauh di bawah 0,7 persen yang ditargetkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Jepang menyediakan bantuan bagi lebih dari 140 negara dan disalurkan melalui tiga cara: hibah bilateral, pinjaman bilateral (langsung ke negara-negara), dan sumbangan ke organisasi-organisasi internasional (seperti kepada badan-badan PBB dan Bank Dunia). Pemerintah Jepang menyediakan bantuan ke negara-negara berkembang berdasarkan pada empat prinsip yang disebutkan dalam Piagam Resmi Bantuan Pembangunan yang dibuat di Tokyo pada tahun 1992:

- Bantuan tersebut harus memajukan pembangunan berkelanjutan.
- Bantuan tersebut tidak digunakan untuk militer.
- Negara-negara penerima bantuan diharuskan memberikan perhatian penuh terhadap kecenderungan pengeluaran biaya militer untuk memelihara dan memperkuat perdamaian dan stabilitas internasional; dan
- Negara-negara penerima bantuan diharuskan memberikan perhatian penuh pada usaha-usaha terhadap demokratisasi, ekonomi yang berorientasi pasar dan penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Atura bantuan Jepang biasanya dirundingkan secara langsung antara pemerintah negara penerima bantuan dan pemerintah Jepang. Namun, terutama untuk penyerahan kekuasaan pada 20 Mei 2002, prosedur pengelolaan proyek-proyek di Timor Lorosa'e lebih rumit dibandingkan pada negara-negara lain dikarenakan tidak adanya suatu pemerintahan yang independen. Selama periode transisi, perundingan-perundingan melibatkan pemerintahan Jepang, UNTAET dan Pemerintahan Umum Timor Lorosa'e (ETPA, East Timor Public Administration). Ditambah Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) dan Kantor Pelayanan Proyek Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNOPS, United Nations Office for Project) telah terlibat dalam administrasi dan pelaksanaan proyek-proyek yang didanai Jepang. Sejak kemerdekaan, pemerintah Jepang sedang mempersiapkan pemerintahan baru Timor Lorosa'e untuk memulai perundingan proyek-proyek bantuan bilateral antara dua pemerintah.

Politik Bantuan Jepang

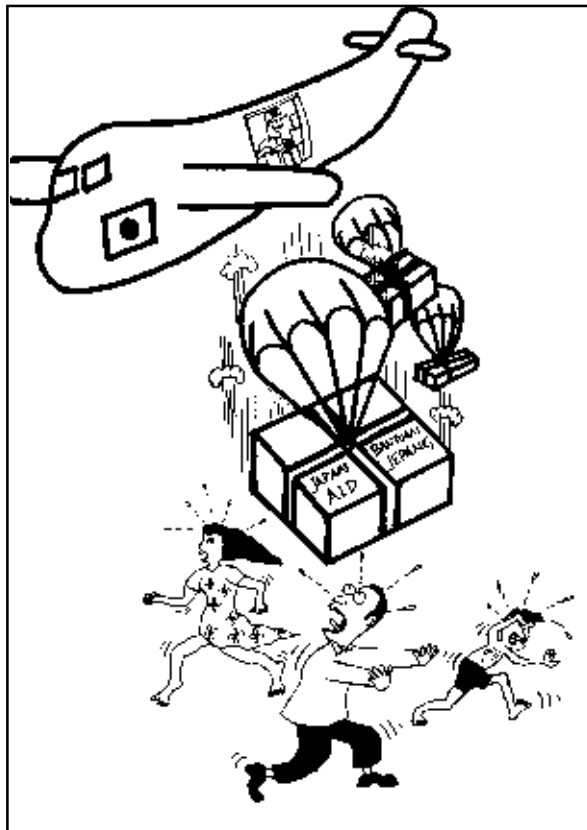
Sejak dasawarsa tahun 1990-an Jepang sudah menunjukkan kepentingan dalam memperkuat pengaruh politiknya di kawasan Asia Pasifik. Tidak mengejutkan bahwa kepentingan ini bertepatan dengan peningkatan bantuan Jepang ke negara-negara di kawasan ini. Pada tahun 1996, lebih dari 50% bantuan Jepang diberikan ke Asia dan Oceania. Ditambah lagi, pada tahun 1994, 51,8% seluruh bantuan ke Asia berasal dari Jepang. Jepang merupakan penyumbang terbesar bantuan di Asia, dan Asia adalah sebuah prioritas untuk Jepang dalam arti bagaimana menyalurkan bantuannya sendiri.

Jepang berupaya menciptakan suatu suasana yang baik bagi bisnis-bisnisnya di negara penerima bantuan. Melalui cara ini, kesehatan perekonomian Jepang dikaitkan dengan bagaimana menyalurkan bantuannya, yakni melalui dua cara.

Pertama, bantuan Jepang sering “mengikat”, dengan pengertian bahwa bantuan itu diberikan berdasarkan syarat-syarat tertentu. Sebagai contoh, bantuan Jepang ke sebuah negara untuk membangun jalan raya mungkin diberikan dengan kondisi bahwa hanya para konsultan dan insinyur Jepang yang diberi upah. Dengan memberikan bantuan “mengikat”, Pemerintah Jepang ingin memastikan bahwa pekerjaan tersebut hanya untuk warga mereka. Ini juga berarti bahwa melalui pengupahan, gaji para konsultan, dan biaya kontrak maka sebagian besar dana bantuan ini akan kembali ke Jepang. Cara kedua adalah bisnis Jepang berpengaruh pada bantuan melalui pelaksanaan ekonomi pasar kapitalis yang menurut Jepang untuk menolong bisnis-bisnis mereka sendiri. Contohnya, mungkin bantuan Jepang secara langsung terhadap rehabilitasi infrastruktur (jalan raya, listrik, air, pelabuhan)

untuk memperoleh akses yang lebih baik ke sumberdaya alam yang mungkin dimiliki negara penerima bantuan. Bentuk lain dari bantuan Jepang mungkin juga langsung ke bantuan teknis dan ekonomi untuk menstabilkan perekonomian dan menyediakan sebuah pasar bagi hasil industri Jepang seperti barang-barang elektronik, transportasi dan telekomunikasi.

Persentase terbesar dari bantuan luar negeri Jepang untuk bantuan pembangunan adalah dalam bentuk pinjaman. Nilai pinjaman kira-kira 40% dari bantuan bilateral Jepang. Jumlah pinjaman terbesar dikelola oleh Bank Jepang untuk Kerjasama Internasional (JBIC, Japan Bank for International Corporation) dan sebagian besar dari dana itu digunakan untuk proyek-proyek infrastruktur, seperti jalan raya, bendungan/dam. dan pembangkit tenaga listrik. Indonesia merupakan negara penerima bantuan pinjaman terbesar Jepang, dan ini menyebabkan meningkatnya jumlah hutang luar negeri Indonesia.



Bantuan Jepang Untuk Timor Lorosa'e

Jepang telah menjadi donor terbesar bagi Timor Lorosa'e sejak September 1999. Mengapa begitu banyak bantuan ke Timor Lorosa'e? Beberapa aktivis Jepang mengatakan bahwa bantuan ini sebagai bentuk perbaikan atas dukungan Jepang di masa lalu atas represifnya rezim Suharto dan pendudukan Indonesia di Timor Lorosa'e. Pemerintah Jepang, begitu penjelasan mereka, mendukung pendudukan Indonesia atas Timor Lorosa'e, dengan menolak pemungutan suara atau abstain pada setiap resolusi Majelis Umum PBB yang mendukung Timor Lorosa'e sejak tahun 1975. Kepentingan ekonomi Jepang di Indonesia adalah mitra perdagangan terbesar di Asia yang menjadi alasan utama untuk posisi mereka atas Timor Lorosa'e.

Perwakilan Kedutaan Jepang menjelaskan kepada *La'o Hamutuk* pada bulan Juli lalu, bahwa alasan utama dukungan Jepang untuk Timor Lorosa'e adalah kebutuhan untuk stabilitas perekonomian di Asia. "Sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Asia, Jepang harus mendukung tetangganya," kata Shinichi Kusano, Bagian Ekonomi Kedutaan Jepang. "Ekonomi Jepang tergantung pada stabil tidaknya arus perdagangan internasional dan stabilitas umum di kawasan Asia. Kestabilan Timor Lorosa'e secara khusus penting karena merupakan tetangga terdekat dengan Indonesia, salah satu negara perdagangan terbesar di Asia. Kenyataannya, Timor Lorosa'e juga muncul sebagai mitra perdagangan bagi Jepang karena empat perusahaan utama Jepang telah menanamkan modal yang sangat berarti pada minyak di Laut Timor dan cadangan gas Timor Lorosa'e. Osaka Gas memiliki 10% dari ladang Sunrise dan ladang Evans Shoal; Inpex, perusahaan minyak utama Jepang lain, memiliki 11,7% dari ladang Bayu-Undan serta saham pada ladang-ladang yang lain. Dan baru-baru ini Phillips Petroleum mengumumkan bahwa Tokyo Electric Power Company dan Tokyo Gas akan membeli sebagian besar gas dari ladang Bayu-Undan (Lihat *Buletin La'o Hamutuk* Vol. 3, No. 5).

Selama Pemerintah transisi PBB di Timor Lorosa'e, Pemerintah Jepang menyediakan hibah bilateral dan disumbangkan kepada organisasi-organisasi multilateral seperti UNDP, UNICEF, dan WFP, serta Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia yang mengelola Dana Perwalian untuk Timor Lorosa'e. Jepang juga penyumbang dana yang berarti untuk Dana Gabungan untuk Timor Lorosa'e, yang mendanai Pemerintah Transisi Timor Lorosa'e.

Sebagai perwakilan pemerintah Jepang di Timor Lorosa'e, Kedutaan Jepang di Dili mengepalai semua bantuan pemerintah secara langsung ke Timor Lorosa'e. Fungsi kedutaan di bawah Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan Jepang dan melaksanakan perundingan-perundingan bilateral meskipun saat ini mereka masih menunggu inisiatif dari pemerintahan baru Timor Lorosa'e.

Organisasi Jepang untuk pembangunan yang dikenal sebagai Badan Jepang untuk Kerjasama Internasional (JICA, Japan International Cooperation Agency) bertanggungjawab untuk mengelola mayoritas bantuan luar negeri Jepang ke Timor Lorosa'e. Bantuan ini mencakup kerjasama teknis, termasuk program-program pelatihan di Jepang maupun di luar negeri, mengirim ahli-ahli Jepang, menyediakan peralatan dan studi-studi pembangunan. JICA secara teknis bukan bagian dari pemerintah, meskipun menerima dana dari pemerintah dan diawasi oleh Kementerian Luar Negeri. JICA juga bekerja secara erat dengan Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri Jepang dan Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Jepang. Bantuan yang dikelola secara langsung oleh Kedutaan Jepang adalah suatu program bantuan dana untuk proyek-proyek masyarakat basis, yang mendukung organisasi-organisasi non-pemerintah dan otoritas pemerintah lokal dalam bermacam-macam proyek-proyek pembangunan skala kecil.

Ada tiga prioritas hibah bilateral untuk Timor Lorosa'e:

- **Rehabilitasi dan Pemeliharaan Infrastruktur** untuk memperbaiki jalan, pengadaan air bersih dan listrik, transfer keterampilan yang berhubungan dengan pemeliharaan dan pengoperasian infrastruktur.
- **Pertanian dan Pengembangan Masyarakat** untuk meningkatkan produktivitas bahan pangan pokok; meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah.
- **Pengembangan Kapasitas** untuk memperkuat kapasitas pegawai negeri sipil dan teknisi yang ada; untuk memajukan program-program pelatihan kemitraan dengan negara-negara Asia.

Sampai sekarang, pemerintah Jepang belum memberikan pinjaman kepada Timor Lorosa'e. Namun, dengan kemerdekaan ini dapat berubah. Bantuan Jepang untuk studi ke negara-negara di Asia telah menunjukkan bahwa hibah awal seringkali digunakan untuk melaksanakan kemungkinan kelayakan studi-studi, yang meletakkan dasar-dasar untuk pinjaman dari Jepang untuk masa mendatang. Sebagai contoh,

PERTANIAN DAN PEMBANGUNAN KOMUNITAS	BADAN YANG MENANGANI	JUMLAH DALAM JUTA DOLAR
Rehabilitasi Sistem Irigasi di Manatuto	UNDP	3,4
Proyek Biji-bijian (Beras dan Jagung)	FAO	0,8
Proyek Aktivasi Komunitas (selama lebih dari lima tahun)	UN Trust Fund	5,0
Proyek Pemberdayaan Komunitas (CEP) JICA	JICA dengan NGO	2,5
Bantuan kepada proyek-proyek "masyarakat" di tingkat basis (18 proyek komunitas yang berbeda-beda)	Kedutaan Besar Jepang	1,5
TOTAL		13,2

PENGEMBANGAN KAPASITAS	BADAN YANG MENANGANI	JUMLAH DALAM JUTA DOLAR
Program Beasiswa Timor Lorosa'e	UNDP	1,4
Rekonstruksi Sekolah Dasar	UNICEF	1,2
Pelatihan untuk Pegawai Negeri (antara lain, pengacara, diplomat)	JICA	Angka tidak tersedia
Pembentukan Fakultas Teknik di Universitas Timor Lorosa'e	UNDP	4,7
Bantuan untuk Pemilu Majelis Konstituante	UNDP	1,2
Bantuan untuk Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi	UNDP	0,5
TOTAL		9,0

di Timor Lorosa'e sebagian besar dana dicurahkan untuk rehabilitasi dan pemeliharaan infrastruktur yang telah dihabiskan pada studi-studi pembangunan oleh para konsultan-konsultan Jepang untuk menciptakan pelaksanaan rencana-rencana untuk proyek-proyek sekarang dan yang akan datang. Itu tidak mengherankan jika para konsultan ini merekomendasikan bahwa rehabilitasi sektor kelistrikan hanya dapat dilaksanakan dengan uang pinjaman oleh pemerintah yang independen Timor Lorosa'e dari pemerintah Jepang.

Bantuan Jepang untuk Rehabilitasi Infrastruktur

Sejak bulan September 1999, ketika militer Indonesia dan milisi bentukannya merusak sebagian besar infrastruktur Timor Lorosa'e, telah ada kebutuhan penting untuk merehabilitasi pelayanan dasar seperti listrik, air, dan jalan raya. Banyak rehabilitasi ini dipusatkan di Dili, dan masih banyak yang dikerjakan di distrik di mana beberapa kota utama yang baru memiliki listrik atau air bersih. Salah satu bantuan utama Jepang yang disumbangkan adalah untuk rehabilitasi infrastruktur fisik di Timor Lorosa'e. Sampai dengan April 2002, pemerintah Jepang telah memberikan US\$31,9 juta untuk rehabilitasi infrastruktur (Lihat Tabel *Rehabilitasi Infrastruktur*).

Proyek-proyek ini telah dilaksanakan berdasarkan garis pedoman yang dinyatakan dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani antara pemerintah Jepang, UNTAET, UNDP, dan calon pemerintah Timor Lorosa'e (kemudian ETTA) pada awal tahun 2000. Nota Kesepakatan antara pihak-pihak ini secara jelas mengatakan bahwa bantuan teknis hanya dapat disediakan dengan mengupah warga negara Jepang. Oleh karena itu UNOPS, dalam melaksanakan proyek, mengupah konsultan dan kontraktor dari Jepang. Jadi, sebagian besar dana yang disimpan untuk proyek-proyek ini yang sebenarnya telah kembali ke Jepang. Tambahan lagi, baik UNOPS maupun UNDP menerima 6% dari total biaya proyek sebagai biaya

administrasi. Oleh karena itu, dalam kasus proyek infrastruktur di Timor Lorosa'e, UNOPS dan UNDP telah menerima hampir US\$1,5 Juta.

Bantuan ini memang telah disediakan untuk peningkatan yang penting untuk infrastruktur Timor Lorosa'e. Pada saat yang sama, ada sejumlah kesulitan agar bantuan bisa benar-benar mencapai sasarannya. Misalnya, di Distrik Lautem, di Kecamatan Iliomar, bantuan dan ahli Jepang membantu memasang dua generator baru, tetapi kota itu tetap tidak ada listrik karena bantuan yang diberikan tidak termasuk kabel-kabel atau tiang-tiang yang dibutuhkan untuk memanfaatkan energi yang dibangkitkan oleh dua generator tersebut. Seperti dikemukakan dalam tulisan tentang kelistrikan di Timor Lorosa'e, banyak generator, terutama di daerah terpencil, yang rusak dan tidak diperbaiki. Sementara persoalan-persoalan ini rumit dan kesalahannya bukan tak bisa ditimpakan hanya pada bantuan Jepang itu sendiri, penting untuk mengkaji seberapa jauh tujuan suatu bantuan sudah dicapai.

Semua bantuan harus diteliti untuk memastikan bahwa uang tersebut menguntungkan rakyat Timor Lorosa'e dan tidak hanya menguntungkan konsultan asing dan badan-badan internasional. Rencana yang rumit beberapa tahun yang lalu antara UNTAET, pemerintah Jepang, dan UNDP berarti bahwa setiap kelompok

REHABILITASI INFRASTRUKTUR	BADAN YANG MENANGANI	JUMLAH DALAM JUTA DOLAR
Jalan Dili-Ainaro-Cassa	UNDP	4,7
Sistem penyediaan air Dili	UNDP	2,4
Pelabuhan Dili	UNDP	3,0
Pusat pembangkit listrik di Comoro	UNDP	3,1
Pusat pembangkit listrik di wilayah pedesaan	UNDP	3,4
Sistem air di Dili (Tahap ke-2)	UNDP	2,4
Sistem air di wilayah pedesaan	UNDP	5,1
Lapangan kontainer di pelabuhan Dili	UNDP	3,0
Sistem irigasi di Lacro, Manatuto	UNDP	4,8
TOTAL		31,9

menyumbangkan personil administratif untuk proyek bantuan Jepang. Personil-personil ini meminta gaji dan biaya-biaya tambahan. Dana ini seringkali diambil dari dana bantuan sehingga dana untuk proyek yang sesungguhnya jadi berkurang. Ditambah dengan biaya bagi para konsultan Jepang yang sangat mahal. Misalnya, kasus proyek rehabilitasi listrik, proyek tersebut memerlukan penasehat teknis dan insinyur Jepang yang diupah, meskipun kenyataan bahwa para staf ini ahli di bidangnya barangkali biayanya terlalu mahal. Proses tender yang terbuka dan transparan untuk posisi-posisi ini akan menjamin bahwa yang dipekerjakan adalah orang-orang yang

paling ahli di bidangnya dan biayanya paling sesuai. Dengan cara ini akan lebih banyak dana yang digunakan untuk rehabilitasi.

Negara-negara donor harus menunjukkan kepedulian mereka untuk memperbaiki perekonomian Timor Lorosa'e dan bukan hanya untuk perekonomian dalam negeri mereka sendiri. Rencana rekonstruksi harus berdasarkan pada efisiensi biaya dengan pengeluaran yang minimal pada pengelolaan dan konsultan. Dan lagi, mereka harus mengakui, memperkuat, dan memanfaatkan sepenuh mungkin keterampilan tenaga kerja Timor Lorosa'e sendiri. ❖

BANTUAN LAIN	BADAN YANG MENANGANI	JUMLAH DALAM JUTA DOLAR
Bantuan Darurat (1999)	Permohonan UNHCR, WFP, UN/ICRC	30,0
Bantuan untuk pengungsi dan mereka yang kembali	NGO Jepang	0,4
InterFET	InterFET	100,0
Pengiriman Pasukan Bela Diri Jepang	PBD	51,2
Dana Gabungan untuk Timor Lorosa'e (Dana Bantuan UNTAET)	UNTAET	9,0
Dana Perwalian untuk Timor Lorosa'e	Bank Dunia/ADB	28,0
Pembentukan Otoritas Fiskal Pusat	IMF	0,7
TOTAL		219,3

** Semua angka di atas, kecuali rincian dari kontribusi untuk rehabilitasi infrastruktur, diperoleh dari laporan pemerintah Jepang pada bulan April 2002 yang berjudul "Kontribusi Jepang kepada Timor Lorosa'e." Rincian tentang rehabilitasi infrastruktur diperoleh dari laporan-laporan pemerintah Jepang yang lain.*

Pasukan Penjaga Perdamaian Jepang di Timor Lorosa'e

Pada bulan Maret 2002, Jepang memberangkatkan 690 personel Angkatan Darat Pasukan Bela Diri (PBD) ke Timor Lorosa'e. Ini merupakan sumbangan terbesar Jepang kepada misi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang oleh pemerintah Jepang disebut "prakarsa yang membuka sebuah era baru".

Setelah Perang Dunia II pada tahun 1946, Jepang mengadopsi sebuah undang-undang baru yang melarang pembentukan atau mempertahankan pasukan militer dan meninggalkan penggunaan kekuatan tentara untuk menyelesaikan perselisihan internasional (lihat di dalam kotak). Walaupun demikian, sejak tahun 1954 Jepang telah mempertahankan apa yang disebut sebagai Pasukan Bela Diri Jepang (*Japanese Self-Defense Force*) yang mandatnya membatasi operasinya sampai wilayah-wilayah yang berbatasan langsung di seputar negara pulau tersebut sebagai suatu cara untuk melindungi diri dari serangan pihak luar.

Pada tahun 1992, meskipun ada kekhawatiran dari publik dan sejumlah partai politik oposisi, pemerintah Jepang meloloskan sebuah undang-undang yang memperbolehkan keikutsertaan PBD dalam misi-misi penjaga perdamaian PBB.

Hal ini terjadi segera setelah Jepang mengirimkan kapal-kapal penyapu ranjau dan kapal-kapal Angkatan Laut lain sebagai bagian dari perang AS-NATO melawan Irak pada tahun 1991, dan dimaksudkan untuk melegitimasi keikutsertaan Jepang dalam manuver-manuver militer internasional. Sejak saat itu, PBD Jepang telah berpartisipasi dalam operasi-operasi PBB di Kamboja, Mozambique, Rwanda, dan Dataran Tinggi Golan (Israel/Syria). Setiap misi telah memberikan kesempatan untuk memperluas parameter dari aktivitas PBD di luar negeri.

Kenyataannya, sebuah amandemen Desember 2001 terhadap Undang-Undang 1992 memperluas cakupan partisipasi PBD dalam misi-misi PBB, memperlunak pembatasan-pembatasan penggunaan senjata dan keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam sebuah laporan *Japan Times* tentang amandemen itu, seorang pejabat Badan Pertahanan menyatakan bahwa PBD bukan lagi "pasukan papan nama," tetapi menjadi angkatan perang yang aktif sepenuhnya.

Walaupun ada amandemen, partisipasi PBD Jepang dalam misi PBB di Timor Lorosa'e tidak begitu berbeda dengan misi-misi di masa lalu, dengan memfokuskan pada kegiatan-kegiatan seperti konstruksi dan transportasi yang dianggap kecil

kemungkinannya mengakibatkan konflik senjata. Personel PBD Jepang di Timor Lorosa'e merupakan sebuah batalyon zeni. Enam ratus delapan puluh tentara bekerja di lapangan, terutama di wilayah-wilayah dekat dengan perbatasan Indonesia (Covalima, Bobonaro, dan Oe-cusse), dan sepuluh orang zeni militer bertugas di Markas Besar PKF di Dili dengan menyediakan bantuan logistik kepada staf lapangan. Kerja PBD difokuskan pada pemeliharaan rute-rute utama pengiriman perbekalan PKF, termasuk mengaspal bandar udara Dili dan memperbaiki jembatan-jembatan dan lubang-lubang jalan Dili-Baucau dan jalan utama dari Dili ke Maubisse, Suai, dan Bobonaro.

Sekarang kerja PBD Jepang di Timor Lorosa'e dikoordinasi oleh UNMISSET dan Markas Besar PKF. PBD Jepang merencanakan berada di Timor Lorosa'e paling tidak sampai bulan Maret 2004, dengan personel-personel militer Jepang diganti setiap enam bulan. Diperkirakan jumlah personelnnya akan berkurang pada pergantian bulan September mendatang, dan bahwa kehadiran PBD Jepang akan banyak dikurangi pada tahun 2003, sejalan dengan dikurangnya jumlah seluruh personel PKF.

Menurut siaran pers dari pemerintah Jepang bulan Mei 2002, bahwa "operasi logistik dan dukungan kepada [Perserikatan Bangsa-Bangsa] ... diharapkan menyediakan bantuan bagi kegiatan-kegiatan ekonomi dan kehidupan sehari-hari rakyat Timor Lorosa'e." Meskipun demikian, seorang pejabat pemerintah Jepang mengatakan kepada *La'o Hamutuk* pada bulan Juli lalu, walaupun para tentara bekerja pada proyek-proyek yang diajukan oleh pemimpin-pemimpin lokal, bantuan utama adalah untuk PKF dan semua proyek harus disetujui oleh PBB. Dia juga menjelaskan bahwa batalyon Jepang tidak akan memperbaiki jalan-jalan kecuali untuk perbaikan yang sementara karena alasan kendala waktu yang hanya dua tahun. "Pekerjaan membangun jalan permanen," ia menjelaskan, "adalah tugas pemerintah Timor Lorosa'e."

Pejabat yang sama menjelaskan bahwa meskipun personel PBD bekerja di wilayah-wilayah perbatasan yang dipandang sebagai wilayah yang menghadapi risiko keamanan, kebanyakan dari mereka tidak dipersenjatai dan tidak dipersiapkan untuk bertempur. Dia menjelaskan bahwa personel PBD mengandalkan kepada batalion PKF lain untuk keamanan mereka, yaitu batalion Selandia Baru di Covalima, batalyon Portugis di Bobonaro dan Dili, dan batalyon Korea Selatan di Oe-cusse.

Meskipun kedua pemerintah baik Jepang maupun Timor Lorosa'e membahas tentang bantuan kemanusiaan dari PBD Jepang di Timor Lorosa'e, tidaklah jelas bagaimana sumbangan mereka itu bersifat kemanusiaan secara langsung. Kehadiran PBD tidak melakukan apa pun untuk menciptakan pekerjaan bagi penduduk lokal dan kenyataannya kelihatan malah menjauhkan potensi pekerjaan dari orang-orang Timor Lorosa'e. Juga tidak jelas mengapa tentara-tentara penjaga perdamaian yang tidak dipersiapkan untuk bertempur yang bekerja di wilayah-wilayah perbatasan di mana mereka mungkin akan menghadapi konflik bersenjata.

Pada bulan Februari 2002, ketika rencana tahap akhir pengiriman PBD, tiga NGO Jepang dan 12 NGO Timor Lorosa'e, termasuk *La'o Hamutuk*, menyatakan menentang terhadap pengiriman itu. Para aktivis Jepang berargumentasi bahwa

pengiriman itu bertentangan dengan konstitusi Jepang (lihat di dalam kotak), teramat sangat mahal dan tidak mendorong terciptanya lapangan kerja lokal. Mereka juga menulis bahwa adalah tidak bermoral mengirimkan tentara-tentara tanpa terlebih dahulu menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan pendudukan Jepang dan mereka menuntut permintaan maaf secara resmi dan ganti rugi terhadap perlakuan kejam Jepang di Timor Lorosa'e.

Para aktivis Timor Lorosa'e juga menuntut sebuah permintaan maaf secara resmi yang memfokuskan pada "rasa keadilan rakyat Timor Lorosa'e" dan mengusulkan agar "lebih baik dana untuk mengirim tentara itu dipakai untuk memberikan ganti rugi kepada korban-korban kekejaman selama Perang Dunia II dan selama pendudukan Indonesia." Selama pendudukan Jepang atas Timor Lorosa'e pada tahun 1942-1945, sekitar 40.000 rakyat Timor Lorosa'e telah dibunuh, ribuan orang digunakan sebagai

buruh paksa oleh tentara-tentara Jepang, termasuk ribuan perempuan sebagai budak seks. Dalam tajuk *Buletin La'o Hamutuk* (Vol. 3 No. 1), Nuno Rodrigues menjelaskan bahwa "permintaan kepada pemerintah Jepang untuk memohon maaf dan bertanggungjawab bukan hanya atas pendudukan Jepang selama Perang Dunia II; tetapi juga selama 24 tahun di mana pemerintah Jepang mendukung Indonesia yang mengorbankan ratusan ribu rakyat Timor Lorosa'e. Hanya langkah-langkah seperti inilah yang akan membangun hubungan bilateral yang kuat antara Timor Lorosa'e dan Jepang. Timor

Lorosa'e memerlukan bantuan finansial dan bantuan dalam membangun kembali negeri yang hancur harus dipandang sebagai sebuah syarat bagi pemerintah Jepang."

Menurut harian *Suara Timor Lorosa'e*, Menteri Luar Negeri José Ramos Horta menyatakan bahwa NGO seharusnya tidak mencampuri urusan-urusan hubungan luar negeri dan malah seharusnya memberikan tanggungjawab ini kepada Pemerintah Transisi. Dia juga berulang-ulang menyatakan bahwa Timor Lorosa'e harus melupakan peristiwa-peristiwa tragis selama Perang Dunia II.

Sebelum mengirimkan pasukan, Jepang telah memberikan sumbangan sebesar US\$100 juta kepada Pasukan Internasional untuk Timor Lorosa'e (InterFET, International Forces for East Timor), yang bersama dengan sumbangan PBD, yang dihitung secara terpisah dari "dana bantuan pembangunan luar negeri". Menurut para pejabat pemerintah Jepang di Dili, pengiriman personel PBD menelan biaya US\$53 juta adalah atas permintaan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Timor Lorosa'e. Anggaran belanja tahunan bagi kehadiran PBD diperkirakan sebesar US\$128 juta.

Timor Lorosa'e sebagai sebuah bangsa adalah korban dari militerisasi internasional dan negara-negara yang memprioritaskan kepentingan ekonomi dengan Indonesia di atas hak-hak asasi di Timor Lorosa'e. *La'o Hamutuk* sekali lagi menyerukan kepada Jepang untuk memohon maaf secara resmi atas keterlibatannya dalam penderitaan Timor Lorosa'e dan untuk memastikan bahwa semua dana bantuan yang di sediakan Jepang kepada Timor Lorosa'e benar-benar dan secara langsung ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat Timor Lorosa'e. ❖

Pasal 9 Konstitusi Jepang:

"Dengan sungguh-sungguh menginginkan perdamaian internasional berdasarkan keadilan dan ketertiban, rakyat Jepang menentang perang sebagai hak kedaulatan suatu bangsa dan ancaman atau penggunaan kekuatan senjata sebagai sarana untuk menyelesaikan pertikaian internasional. Untuk mencapai tujuan ini pasukan darat, laut, dan udara, serta kekuatan perang yang lain, tidak akan pernah dikembangkan. Hak negara untuk berperang tidak akan pernah ditolelir."

Promete husi Nasaun Doadores

Tuir mai informasaun jeral kona ba promete husi doadores sira iha fulan Maio 2002 konfrensia iha Dili (le'e iha *Buletin La'õ Hamutuk* Vol.3 No. 5), ho data hirak ne'e hola husi konfrensia no informasaun husi donors oi-oin. Lista informasaun kona ba osamento husi nasaun doadores la kompletu *La'õ Hamutuk* la bele kontaktu doadores hotu-hotu no mos susar tebes tamba Banku Mundial nebe tomakonta ba prosesu ne'e lafo informasaun. Doadores promete hakarak fo osan hira-hirak maibe mos latuir buat nebe sira promete. ❖

NASAUN	PROMETE TOTAL (USD JUTA)	BAINHIRA/ USA BA SAIDA
Jepaun	60	\$50 juta ba futuro; \$10 juta husi promete uluk (sira promete depois de konfrensia)
Komisaun Europea (Uniaun Europeia)	42	\$25 juta ba tinan 2002 (\$8,1 juta ba TFET, \$9 juta ba saude, \$2,3juta ba UNDP no mos \$5,9 juta ba projetu seluk)\$9 juta ba tinan 2003, \$7,3 juta ba tinan 2004
Australia	38	Uza iha tinan 4 husi 2000-2004 (\$22 juta ba tinan fiskal 2000-2001, \$22 juta ba tinan 01-02, \$19 juta ba 02-03, \$19 juta ba 03-03)
Estadus Unidus (Amerika)	25	Ba tinan fiskal 2002-2003 (Husi \$25 juta ne'e, \$4 juta suporta ba orsamentu no \$150.000 ba Amerika nia Peace Corps (Brigada Dame, hare Berita Singkat, pagina 14) atu suporta ba projekto ki'ik ida nebe halo boluntario monitoring.\$1 juta ba Finansas Militar Internasional no \$500.000 ba programa Militar Internasional Edukasaun no Formasaun (IMET)
Inglaterra (UK)	17	Suporta orsamentu ba tinan tolu 2002-2005 (\$5,8 juta per tinan)
Portugal	9,1	Portugal promete atu fo 10% husi \$91 juta mak falta ba osamentu governu Timor Lorosa'e-nian
Xina	6	La dehan baihira ka ba saida
Irlandia	2,2	Uza ona durante tinan 2002 (\$500.000 fo tiona ba CFET; \$1 juta suporta ba orsamentu \$720.000 Suporta ba Programa UNDP; \$140.000 ba Komisaun Rekonsiliaun \$230.000 ba projekto genero ho komunidadade)
Nova Zelandia	1,4	\$230.000 suporta orsamentu; \$1,1 juta ba projetu bilateral iha edukasaun TK, rekursu naturais, desenvolvimentu komunidadade ho kapasidade governu-nian
Korea do Sul	0,9	\$600.000 ba selebrasaun loron independensia\$300.000 fo ba governo atu usa ba edukasau medical nian
Kanada	La dehan hira	Kontinua suporta ituan ba kleur
Brazil	La dehan hira	Hakarak suporta iha edukasau, saude, agrikultura, mos area seluk iha diplomatika. Suporta iha tempu naruk.
Philippines	La dehan hira	Fasilita traino managemen, agriculture, ekonomia, fo biasiswa ba estudante sira nebe hakarak estuda iha Philippines.
Malaysia	La dehan hira	Halo asistencia ba kapasitas, edukasaun, saude.
Meksiko	La dehan hira	Hakarak suporta sei halo diskusaun ba sira nia governu.
Namibia	La dehan hira	Hakarak kontribui atu harii kapasidade.
Norway		La promete

Laporan Khusus Tentang Listrik

Sekitar 75% bangunan fisik pekerjaan umum dihancurkan dan dibakar oleh militer dan milisi Indonesia pada September 1999. Di antara bangunan-bangunan yang dihancurkan termasuk fasilitas-fasilitas jaringan kelistrikan yang menghubungkan antara satu distrik dengan distrik lain. Sampai sekarang pun beberapa tempat masih tidak ada listrik. Selain di Distrik Baucau yang listrik hidup selama 18 jam dan kota Dili yang bergiliran mati selama 2 jam, di distrik lain listrik hanya hidup pada saat malam hari dari jam 7-12 malam. Alasannya, mahalnya bahan bakar.

Perusahaan Listrik Timor Lorosa'e yang bernama Electricidade de Timor Leste (EDTL) adalah instansi di bawah Departemen Pekerjaan Umum. Sebelum kemerdekaan dan selama Masa Transisi pertama berakhir pada bulan Agustus tahun 2001, otoritas listrik berada di bawah Departemen Ekonomi, termasuk Pekerjaan Umum UNTAET. Saat ini EDTL belum memiliki suatu mekanisme kerja yang bagus dalam menjalankan administrasi dan pertanggungjawaban laporan keuangan karena semua dikendalikan oleh Departemen Keuangan.

Karena mekanisme pembagian kewenangan yang turun dari atas tidak jelas sehingga membingungkan pihak EDTL. Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan bersama oleh La'o Hamutuk dan Yayasan HAK maka kami menurunkan uraian pembahasan tentang sumber dana, kapasitas dan jumlah mesin generator, jumlah dan gaji karyawan, kategori nasabah dan ongkos listrik atau pajak yang dikenakan bagi nasabah.

Sumber Dana

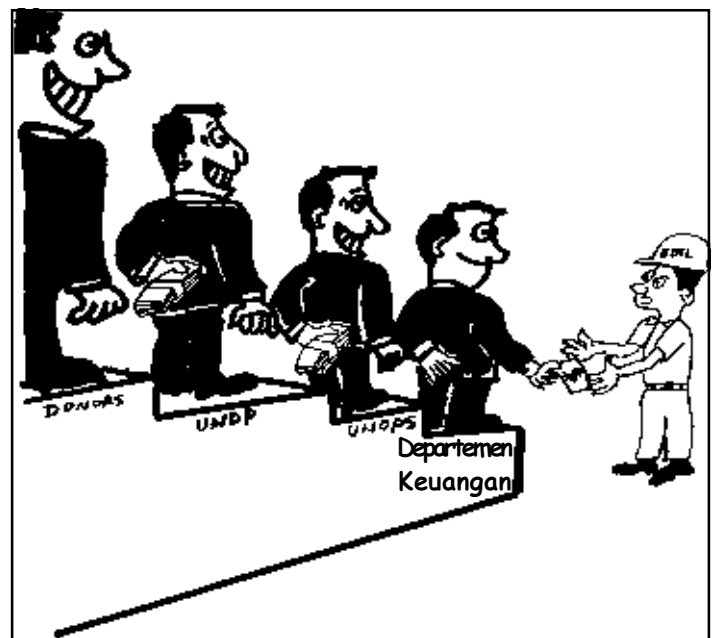
Menurut Kepala Kantor Electricidade de Timor Leste, Ir. Virgilio Guterres perkiraan dana untuk tahun anggaran 2001/2002 sebesar US\$11.800.000 namun dana yang diberikan hanya US\$6.800.000 dan begitu juga perkiraan untuk tahun anggaran 2002-2003 sebesar US\$11.88.000 namun para donor hanya akan memberikan sebesar US\$4.000.000

Beberapa negara menyumbangkan dananya untuk EDTL melalui bantuan bilateral. Dua donor terbesar adalah pemerintah Jepang dengan dukungan dana berjumlah US\$3.100.000 dan pemerintah Portugal sebesar US\$1.000.000 yang dicairkan sekitar bulan Juli dan Agustus tahun 2000. Penanggungjawab dari dana kedua negara di atas dikelola oleh United Nations Development Programme (UNDP, Program Pembangunan PBB) dan Bank Pembangunan Asia (ADB) karena para donatur hanya mempercayai institusi keuangan internasional dan badan-badan PBB untuk mengelola dana yang mereka berikan. Dana yang diberikan oleh pemerintah Jepang dan Portugal sebagai donor terbesar untuk sektor kelistrikan dikelola oleh UNDP sedangkan proyek dijalankan oleh United Nations Office of Projects Services (UNOPS, Kantor Pelayanan Proyek-proyek PBB). Menurut Risa Ito, kepala proyek UNOPS, maka UNOPS akan mendapatkan 6% dari setiap proyek yang akan dijalankan. Akibat pemotongan 6% untuk anggaran administrasi UNOPS maka dana dari pemerintah Jepang berkurang menjadi US\$2.390.000. Dana tersebut digunakan untuk seluruh kebutuhan pusat pengendalian listrik, tetapi karena instalasi

Comoro rusak maka pemerintah Jepang, UNDP, dan UNTAET mengeluarkan kebijakan untuk mengeluarkan dana sebesar US\$478.000 dari dana US\$2.390.000 untuk memperbaiki instalasi Comoro. Dengan demikian dana sebesar US\$1.912.000 digunakan untuk kebutuhan seluruh pusat pengendalian listrik, termasuk penempatan generator di 13 distrik.

Menurut Virgilio Guterres, bantuan pemerintah Jepang dilengkapi dengan peralatan dan tenaga ahli, sehingga karyawan lokal hanya sebatas pemantauan fisik saja. Artinya, secara penuh ditangani oleh pemerintah Jepang, UNDP, dan UNOPS. Dana dari pemerintah Portugal digunakan untuk memperbaiki kembali 4 power station di 4 sub-distrik, yaitu di Celecai, Distrik Baucau, Luro di Distrik Lospalos, dan Laclubar dan Natarbora di Distrik Manatuto.

Dengan pertimbangan EDTL harus bisa mandiri dan untuk menambah sisa dana untuk tahun anggaran 2001-2002 sekitar US\$5.000.000, maka EDTL menerapkan pajak pembayaran listrik kepada konsumen. (lihat di dalam kotak *Peraturan*) Dana dari pemerintah baru US\$6.800.000 dipergunakan untuk biaya bahan bakar dan pemeliharaan. Berdasarkan kesepakatan pemerintah dengan Pertamina bahwa setiap tiga bulan pemerintah ETPA (dalam hal ini EDTL) akan membayar bahan bakar minyak. Pembayaran pertama dilakukan pada tahun 2000 untuk tiga bulan yaitu November-Desember dan Januari 2001 sebesar US\$1.100.000. Tetapi sekarang pembayaran dilakukan setiap bulan yaitu sebesar US\$510.000. Menurut Ir. Virgilio Guterres karena mahalnya harga solar, US\$0,34/liter. Informasi terakhir dari *Timor Post* (8/7/02), persediaan bahan bakar minyak untuk 35 pusat pengendalian listrik dan dua power station di Comoro dan Caicoli disediakan oleh enam perusahaan minyak yang berbeda yaitu perusahaan minyak Colega Timor, East Timor Fuel, Baboe, WP Timor Oan, Country Fuel, dan Pertamina. Jadi pihak Pertamina tidak lagi memonopoli penyediaan bahan bakar minyak untuk kelistrikan Timor Lorosa'e.



Jumlah Generator

Khusus di Distrik Dili, Pemerintah Transisi UNTAET menyewa 5 buah generator, 2 di Caicoli dan 3 di Comoro. Dana yang telah dialokasikan untuk menyewa mesin-mesin tersebut sebesar US\$200.000 yang berasal dari anggaran Dana Konsolidasi Timor Lorosa'e (CFET) yaitu melalui anggaran untuk sektor listrik bagian perbaikan dan pelayanan. Menyewa generator dilakukan oleh pemerintah karena listrik sering padam pada bulan Juli hingga Oktober 2001. Penyewaan tersebut dikarenakan generator-generator peninggalan Indonesia banyak yang rusak. Di Comoro terdapat kerusakan pada generator bermerek/tipe MAK 4 No.5, maka untuk sementara yang berfungsi secara penuh adalah MAK 1 dengan kapasitas 1,8 Mega Watts, MAK 2 dengan kapasitas 1,6 Mega Watts, MAK 3 serta NIGATA masing-masing berkapasitas 2,6 Mega Watts.

Berhubung masa sewa generator di Caicoli berakhir pada tanggal 27 Januari 2002 sedangkan masa sewa generator di Comoro berakhir pada tanggal 28 Februari 2002 maka EDTL membatasi pemakaian listrik dengan mengukur setiap pemakaian yang melebihi batas maksimum. Menurut Ir. Virgilio Guterres, "Pemerintah secepatnya mengambil langkah-langkah konkrit untuk menjawab perubahan-perubahan. Tanpa ada antisipasi sejak sekarang, dijamin listrik tidak dapat berfungsi sesuai harapan." EDTL semula berkapasitas sebesar 13 Mega Watts, tetapi setelah mendapat tambahan 1 buah generator yang diperbaiki oleh pemerintah Jepang pada bulan Desember 2001 maka kapasitasnya menjadi 14 Mega Watts. Diharapkan kapasitas yang dimiliki EDTL akan terus meningkat.

Jumlah generator untuk Sub-Distrik menurut Power Service EDTL, terdapat 32 pusat pengendalian listrik yang berjalan normal. Tiga belas pusat pengendalian listrik ditangani pemerintah Jepang, yang akan memberikan 2 generator untuk setiap pusat pengendalian listrik, termasuk perbaikan instalasi di Comoro. Sedangkan ADB menangani 15 pusat pengendalian listrik masing-masing dengan 1 buah generator. Pengadaan generator disesuaikan dengan jumlah beban yang dibutuhkan di masing-masing tempat. Khusus untuk Distrik Aileu, menurut koordinator umum Kelistrikan Distrik, Domingos Bonaparte, terdapat 3 generator peninggalan pemerintah Indonesia yang masih baik. Keseluruhan generator di seluruh pusat pengendalian listrik adalah 83 buah ditambah 3 di Distrik Aileu sehingga total generator di Timor Lorosa'e adalah 86 buah di luar 5 generator yang disewa, tetapi yang berfungsi secara maksimal hanya 28 buah.

Jumlah Karyawan EDTL.

Pada bulan Januari tahun 2002, total staf di seluruh Timor Lorosa'e berjumlah 205 orang. Perekrutan secara nasional belum dilakukan. Sekitar 192 orang direkrut saat Department For International Development (DFID) dari Inggris menangani EDTL pada bulan September 1999 dan sisanya sekitar 13 orang direkrut oleh UNTAET sesuai kualifikasi masing-masing dan sekarang digaji oleh pemerintah baru. Tetapi masalah serius yang dihadapi EDTL adalah minimnya karyawan bagian pencatatan meteran. Untuk mengatasinya, telah direkrut lagi 45 orang, dengan sistem kontrak yang diperbaharui setiap 3

Jumlah Generator di Distrik dan Pusat

PUSAT	JUMLAH GENERATOR	KONDISI
Aileu	3	semua berfungsi
Alas	1	berfungsi
Atabae	3	akan diperbaiki oleh Jepang
Atauro	2	berfungsi
Atsabe	2	sudah diperbaiki Jepang tetapi belum berfungsi
Baguia	2	1 yang berfungsi
Balibo	2	akan diperbaiki oleh ADB
Batu-Gede	1	akan diperbaiki oleh ADB
Bazartete	2	sudah diperbaiki oleh Jepang tetapi belum berfungsi
Betano	1	akan diperbaiki oleh ADB
Bobonaro	1	akan diperbaiki oleh ADB
Cai-Coli	6	rusak semua
Cailaco	1	akan diperbaiki
Comoro	6	berfungsi
Fatu-berliu	2	telah berfungsi diperbaiki oleh Jepang
Fatumean	1	rusak
Fohorem	1	rusak
Gleno	5	4 rusak hanya 1 berfungsi telah diperbaiki oleh ADB
Hatolia	2	sedang diperbaiki oleh Jepang
Hatubuilico	1	akan diperbaiki oleh Jepang
Hatu-Udo	1	akan diperbaiki oleh Jepang
Iliomar	1	sedang diperbaiki oleh Portugal
Laclubar	1	telah berfungsi diperbaiki Portugal
Lacluta	2	telah berfungsi diperbaiki oleh Jepang
Lautem	1	berfungsi
Letefoho	tidak ada	dapat dari Gleno
Liquedoe	1	sedang diperbaiki oleh ADB
Loes	1	akan diperbaiki oleh Jepang
Lolotoe	1	akan diperbaiki oleh ADB
Luro	1	sedang diperbaiki oleh Portugal
Manelima	1	akan diperbaiki oleh ADB
Maubisse	2	telah berfungsi diperbaiki oleh ADB
Natarbora	2	sedang diperbaiki oleh Portugal
Nitibe	1	akan diperbaiki oleh ADB
Oesilo	1	akan diperbaiki ADB
Ossu	2	1 yang berfungsi
Passabe	1	akan diperbaiki ADB
Quilicai	1	berfungsi
Railaco	2	sudah berfungsi
Raimean	1	akan diperbaiki oleh Jepang
Remexio	2	sudah berfungsi diperbaiki oleh Jepang
Soibada	1	berfungsi
Tilomar	1	akan diperbaiki oleh ADB
Turiscail	1	berfungsi sudah diperbaiki oleh ADB
Tutuala	2	berfungsi
Uatu-carbau	2	berfungsi
Uatulari	3	2 yang berfungsi
Vatu-boro	1	sudah diperbaiki oleh Jepang tetapi belum berfungsi
Venilale	2	berfungsi
Zumalai	2	akan diperbaiki Jepang

(Sumber :Dominggos Bonaparte Koordinator kelistrikan distrik)

bulan. Dana untuk tujuan ini diambil dari anggaran otoritas listrik yaitu dari alokasi permanen pemerintah. Ada kemajuan kerja karyawan dibagian pembayaran listrik dan administrasi serta keuangan.

Teknisi listrik di EDTL, selain staf asing, terdapat pula 3 orang teknisi Timor Lorosa'e yang berpaspor luar negeri dengan gaji sekitar US\$1.500 sampai US\$3.800 per bulan. Dan terdapat 1 orang teknisi asing dengan gaji per bulan sebesar US\$5.000. Tetapi karena pertimbangan anggaran dan efisiensi maka EDTL tidak memperpanjang masa kontrak para teknisi tersebut pada akhir Januari sampai bulan Februari 2002. Menurut Virgilio, telah terjadi penghamburan dana untuk membayar tenaga asing dan orang Timor yang berpaspor luar negeri tetapi hasil kerjanya tidak lebih baik dibandingkan orang lokal. Padahal, berkat pengalaman teknisi lokal pada zaman Indonesia sehingga mereka dapat mengerjakan pekerjaannya dengan lebih baik.

Menurut laporan Anggaran Sumber Gabungan ETTA tahun anggaran 2001-2002, diperkirakan dana yang diperlukan untuk menyewa teknisi asing mencapai US\$138.000. Dengan demikian sektor lain yang mendapatkan bantuan teknis secara

signifikan adalah infrastruktur atau sebesar 14% sehingga sedikit di bawah sektor pemerintah umum dan pendidikan. Dalam laporan tersebut terdapat beberapa sumber dana untuk membiayai teknisi, seperti TFET US\$750.000, bilateral US\$800.000, serta kontribusi taksiran US\$935.000, maka total mencapai US\$2.485.000. (*sumber: The East Timor Combined Sources Budget Central Fiscal Authority*)

Kategori Nasabah

Sesuai petunjuk UNTAET No. 6/tahun 2000, sejak tanggal 26 Juli 2000, nasabah dibagi dalam 3 katagori, yaitu domestik, komersial, dan sosial:

- *Domestik* adalah tempat yang biasa digunakan untuk rumahtangga, termasuk apartemen yang mempunyai meteran masing-masing.
- *Komersial* adalah tempat yang digunakan untuk usaha, misi asing, hotel, rumah kost, perusahaan, gedung dan jasa pemerintah, sekolah asrama dan institusi lain.
- *Sosial* adalah tempat yang digunakan oleh organisasi kemanusiaan nir-laba dan organisasi agama.

Namun, pihak EDTL seringkali salah dalam menentukan kategori tersebut. Itu dialami oleh salah seorang pekerja sosial,

Maria Dias yang memiliki Klinik PAS di Becora. Pihak EDTL mengkategorikannya sebagai konsumen komersial dan Maria Dias diharuskan membayar biaya sebesar lebih dari US\$1.500 terhitung bulan September tahun 2001. Tentu saja Maria Dias keberatan karena Klinik PAS melakukan fungsi sosial. Ia kemudian melakukan pengaduan ke EDTL tetapi ironisnya pihak EDTL mengatakan bahwa yang bisa mengubah semua kebijakan itu adalah menteri yang menangani kelistrikan.

Berkaitan dengan hal ini, menurut Virgilio Guterres, pihak EDTL mengalami kerugian yang sangat besar karena banyak konsumen yang tidak membayar listrik. Contohnya, pihak EDTL mengeluarkan in-voice pada bulan Juni 2002 kepada para konsumen dengan kategori sebagai berikut;

- Untuk konsumen domestik: in-voice yang dikeluarkan berjumlah 13.586 namun hanya sekitar 606 konsumen yang membayar.
- Untuk konsumen komersial: in-voice yang dikeluarkan berjumlah 713 namun hanya sekitar 92 konsumen yang membayar.
- Untuk konsumen sosial: in-voice yang dikeluarkan berjumlah 37 namun hanya sekitar 5 konsumen yang membayar.
- Dan untuk pemerintah: in-voice yang dikeluarkan berjumlah 56 tetapi hanya 6 yang membayar.

Seandainya semua in-voice dibayar maka jumlah uang yang didapatkan pihak EDTL pada bulan Juni berjumlah sekitar US\$781.503, tetapi karena banyak konsumen yang tidak membayar maka pihak EDTL hanya mendapatkan US\$231.000.

Informasi untuk kondisi bulan April dan Juni 2002, khususnya kota Dili, EDTL hanya mempunyai tenaga listrik berkapasitas 11,1 Mega Watts dan ketika putaran sepak bola Piala Dunia berlangsung pada bulan Juni pihak EDTL mengambil kebijakan untuk menyewa salah satu mesin generator berkekuatan 1 Mega Watts, sehingga kekuatannya menjadi 12,1 Mega Watts tetapi menurut Virgilio Guterres masih belum mencukupi karena beban puncak mencapai 12,8 Mega Watts pada

Peraturan UNTAET no. 6/tahun 2000:

Biaya penyambungan di dalam peraturan juga terdapat biaya penyambungan sebagai berikut:

- US\$10 untuk tempat domestik;
- US\$15 untuk tempat sosial;
- US\$20 untuk semua tempat komersial satu fase;
- US\$100 untuk tempat komersial tiga fase tanpa meteran current transformer (CT) yang sekarang atau dengan meteran transformer yang dipasang oleh nasabah;
- perkiraan biaya total untuk tempat komersial tiga fase dengan meteran transformer yang sekarang, dipasang oleh pelayanan tenaga listrik. Bila biaya total melebihi perkiraan, perbedaan akan dibayar sebelum mulainya persediaan.

Ongkos Listrik/Pajak Listrik

Ongkos untuk setiap kWh listrik yang disediakan oleh Pelayanan Tenaga Listrik ditetapkan sebagai berikut:

- Ongkos US\$ per kWh = US\$ 0,117 + (US\$ 0,0986 x CFP/BFP)
- CFP = Harga Bahan Bakar Sekarang (Current Fuel Price) dalam US Dollar per liter dikirim ke pembangkit tenaga listrik Comoro dan Caicoli; dan BFP = Harga Bahan Bakar Dasar (Base Fuel Price) yang adalah US\$0,26 per liter.
- Ongkos per kWh akan dibulatkan ke atas untuk mencapai US\$0,001 terdekat per kWh.
 - Ongkos per kWh akan ditetapkan untuk semua listrik yang disediakan oleh Pelayanan Tenaga Listrik, tanpa perkecualian; *tetapi:*

Untuk tempat Domestik dan Sosial, 25 kWh pertama yang digunakan per bulan akan dipungut biaya nol atas dasar sementara dan terkecuali, *asalkan* US\$ 1,00 dibayar pada Pelayanan Tenaga Listrik setiap bulan.

Ongkos akan ditinjau kembali dan diubah ke atas atau ke bawah, bila perlu, sekurang-kurangnya setiap enam bulan. Bila perubahan dalam ongkos membutuhkan peningkatan dalam tingkat ongkos, nasabah akan diberitahukan sekurang-kurangnya satu bulan sebelum ongkos lebih tinggi mulai diberlakukan.

saat penayangan sepak bola, sehingga terkadang ada beberapa wilayah listrik mati dikarenakan kapasitas yang ada tidak mencukupi. Virgilio Guterres mengatakan bahwa bukan pihak EDTL yang sengaja mematikan listrik pada jam tayang sepak bola tetapi karena beban puncaknya melebihi kapasitas yang ada.

Setelah berakhirnya Piala Dunia pihak EDTL tidak lagi menyewa mesin tersebut, sehingga kekuatannya 11,1 Mega Watts, tetapi pada akhir Juli lalu (27/7) dua buah mesin diesel di Comoro mengalami kerusakan sehingga kapasitas turun menjadi 7 Mega Watts. Menurut Kepala EDTL kerusakan terjadi karena umur mesin-mesin tersebut telah mencapai 20 tahun lebih yang harus beroperasi selama 24 jam. Pada malam hari ketika sebagian wilayah di kota Dili mati secara bergiliran

itu dikarenakan beban puncak tidak mencukupi. Beban puncak untuk saat ini sekitar 11,5 Mega Watts karena berkurangnya staf internasional.

Menurut La'ó Hamutuk, dana-dana yang diberikan oleh pemerintah Jepang dan Portugal tetapi pengelolaannya dilakukan oleh UNDP dan UNOPS, begitu juga yang dilakukan Bank Pembangunan Asia ini menunjukkan bahwa pemerintah Jepang dan Portugal belum mempercayai pemerintah Timor Lorosa'e untuk mengelola bantuan bilateral tersebut. Seharusnya dengan dana sebesar itu bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi EDTL. Pemerintah Jepang selain memberikan bantuan dana juga mendatangkan tenaga ahli tetapi tidak memberdayakan para teknisi lokal Timor Lorosa'e. ❖



Dengarkan Radio La'ó Hamutuk!

Dengarkan berita dan komentar selama satu jam dari staf La'ó Hamutuk dan ahli-ahli lain di program *Igualidade* setiap hari Sabtu pada jam 1:00 siang di Radio Timor Leste (dulu Radio UNTAET).

Siapa itu La'ó Hamutuk?

Staf La'ó Hamutuk : Inês Martins, Thomas (Ató) Freitas, Mericio (Akara) Juvenal, Adriano do Nascimento, Yasinta Lujina, Charles Scheiner, Pamela Sexton, Jesuina (Delly) Soares Cabral, Andrew de Sousa

Penerjemah: José M.C. Belo, Djoni Ferdiwijaya, Helen Donovan, Tomé Xavier Geronimo, Titi Irawati

Dewan Penasehat: Sr. Maria Dias, Joseph Nevins, Nuno Rodrigues, João Sarmento, Aderito de Jesus Soares

La'ó Hamutuk berterima kasih kepada pemerintah Finlandia yang mendukung publikasi ini.

Laporan Tentang Konferensi Minyak di Darwin, Australia

Konferensi Lepas Pantai Australia Asia Tenggara (SEAAOC, the South East Asia Australia Offshore Conference) membahas pertambangan minyak dan gas di lepas pantai di wilayah Australia dan Asia Tenggara. Konferensi ini diselenggarakan untuk perusahaan perminyakan dan perusahaan industri lainnya untuk mempromosikan pengembangan teknologi lepas pantai. Kepentingan minyak dan gas Australia mendominasi konferensi ini dan salah satu wilayah perhatian adalah ladang-ladang gas dan minyak di Laut Timor.

Konferensi yang diadakan pada tanggal 17-19 Juni 2002 di Darwin, Australia itu merupakan konferensi lepas pantai yang ke-8 yang diorganisir oleh Institut Penelitian Internasional, sebuah bisnis Australia yang menyelenggarakan konferensi mengenai berbagai topik. Konferensi ini diikuti oleh lebih dari 300 orang termasuk wakil-wakil pemerintah Australia dan Timor Lorosa'e serta perusahaan perminyakan. Adriano do Nascimento dari *La'o Hamutuk* mewakili Pusat Informasi Independen Laut Timor, sebuah kelompok masyarakat sipil yang sebelumnya disebut Kelompok Kerja Celah Timor dan aktivis Australia yang memiliki kepedulian terhadap persoalan Celah Timor juga menghadiri konferensi ini. Pusat Informasi Independen Laut Timor berpartisipasi untuk menambah pengetahuannya tentang pengembangan minyak di Laut Timor dan untuk meningkatkan komunikasi dengan perusahaan, pejabat pemerintah, dan lainnya yang bekerja di bidang ini.

Celah Timor adalah salah satu topik utama dalam presentasi dari wakil-wakil pemerintah Australia, Timor Lorosa'e dan perusahaan-perusahaan minyak. Masing-masing kelompok ini memberikan presentasi tentang Celah Timor berdasarkan peranan dan kepentingan masing-masing.

Pemerintah Australia

Pada pidato pembukaan konferensi, wakil pemerintah Northern Territory, Ketua Menteri Clare Martin yang mengangkat dua masalah utama: Perjanjian Laut Timor yang ditandatangani pada tanggal 20 Mei 2002 dan pipa gas.

Menurut Martin, pemerintah Northern Territory dan masyarakatnya mempunyai persepektif bahwa gas alam di Celah Timor merupakan kunci pengembangan minyak dan ekonomi bagi Australia dan akan membuat Darwin menjadi pasar gas terbesar keempat di Australia.

Ketua Menteri mengatakan kepada peserta konferensi bahwa harapan Australia terletak pada penandatanganan Perjanjian Laut Timor untuk mengeksplorasi minyak dan gas bersama antara Australia dan Timor Lorosa'e. Menurut perspektifnya, Perjanjian Laut Timor adalah langkah awal yang baik dalam mengembangkan industri perminyakan Australia.

Terdorong oleh kepentingan ini, pemimpin Northern Territory meminta parlemen kedua negara untuk secepatnya meratifikasi Perjanjian Laut Timor. Dia mengatakan bahwa meratifikasi Perjanjian Laut Timor itu akan memberikan jaminan legal dan komersial bagi investasi perusahaan di Celah Timor.

Karena alasan itu, menurut Martin, ratifikasi Perjanjian Laut Timor akan memperkuat hubungan persahabatan antara kedua bangsa dan rakyat. Martin mengabaikan fakta bahwa

Perjanjian Laut Timor ini juga memberi Australia kontrol atas wilayah yang luas yang menurut hukum internasional seharusnya menjadi milik Timor Lorosa'e.

Pemerintah Australia merasa bahwa 90% pendapatan produksi dari wilayah bersama (JPDA) yang tercantum dalam Perjanjian Laut Timor merupakan kompensasi yang adil bagi Timor Lorosa'e. Untuk alasan itu, menurut Martin, ratifikasi Perjanjian Laut Timor akan memperkuat hubungan persahabatan antara kedua bangsa. Martin mengabaikan kenyataan bahwa Perjanjian Laut Timor itu juga memberikan Australia mengontrol wilayah yang lebih besar, yang seharusnya Timor Lorosa'e yang mengontrol berdasarkan hukum Internasional. Menyangkut rencana penyambungan pipa, Martin mengatakan bahwa pemerintah Australia – khususnya pemerintah Northern Territory – sungguh berharap agar pipa gas akan dibangun dari Celah Timor ke Darwin sehingga memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat Australia, meningkatkan investasi, bisnis dan renovasi teknologi di Australia.

Pemerintah Australia, khususnya Northern Territory, yakin bahwa jika gas dari ladang Bayu-Undan dan ladang-ladang Sunrise dibawa ke Darwin untuk diproses, ini akan:

- Mendiversifikasi ekonomi nasional;
- Menciptakan lapangan kerja sekitar 10.600; dan
- Menambah pendapatan nasional US\$ 8 miliar sepanjang proyek berlangsung.

Selain beberapa poin di atas, gas dari Bayu-Undan dan Sunrise juga diharapkan akan membawa :

Kesempatan bagi program bisnis dan program pelatihan baru ;

- Mengurangi ketergantungan pemerintah Northern Territory kepada pemerintah pusat, menjamin kemampuan pemerintah Northern Territory untuk mendukung program pembangunan sosialnya sendiri ;
- Pendapatan tahunan sebesar US\$60 juta di mana US\$55 juta diperuntukkan bagi pemerintah nasional.

Pemerintah Timor Lorosa'e

Perdana Menteri Mari Alkatiri mengatakan kepada peserta konferensi tentang posisi pemerintah Timor Lorosa'e pada tiga masalah: Perjanjian Laut Timor, batas perairan laut, dan status ladang minyak dan gas.

Alkatiri mengatakan bahwa Perjanjian Laut Timor yang ditandatangani dengan John Howard itu sangat penting dan bermanfaat bagi hubungan kedua bangsa. Dalam pandangannya, Perjanjian Laut Timor mempererat komitmen bagi saling pengertian antara kedua bangsa. Ia menjanjikan kepada peserta konferensi bahwa Perjanjian Laut Timor akan diratifikasi secepatnya di Timor Lorosa'e.

Perdana Menteri mengatakan bahwa batas perairan harus diselesaikan berdasarkan prinsip-prinsip hukum internasional, mengakui kedaulatan nasional Timor Lorosa'e, dan ia sendiri akan mengangkat masalah batas perairan ini dengan Australia.

Menurut Alkatiri, pemerintah Timor Lorosa'e juga akan melanjutkan pembicaraan menyangkut status ladang minyak dan gas tertentu seperti Laménaria, Carroline dan Sunrise. Timor Lorosa'e mempunyai hak sepenuhnya atas Laménaria dan Sunrise jika batas perairan diselesaikan menurut hukum

internasional seperti yang termuat dalam Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS).

Alkatiri juga menyatakan secara langsung kepada perusahaan-perusahaan perminyakan bahwa daerah Pertambangan Minyak Bersama adalah "bisnis terbuka". Dengan ini, dia mendorong perusahaan-perusahaan perminyakan untuk melanjutkan perkerjaan mereka di ladang minyak dan gas di Celah Timor.

Perusahaan Perminyakan

Dalam konferensi itu ada empat perusahaan perminyakan yang memberikan perspektif mereka mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan Celah Timor. Mereka mengangkat berbagai masalah termasuk Perjanjian Laut Timor, perpajakan dan pipa gas.

Mereka menyatakan bahwa ratifikasi Perjanjian Laut Timor merupakan masalah yang penting yang harus diselesaikan oleh Australia maupun Timor Lorosa'e. Ratifikasi Perjanjian Laut Timor merupakan butir agenda yang menentukan bagi perusahaan-perusahaan itu karena hanya dengan ratifikasi mereka akan memperoleh kerangka legal dan jaminan komersial untuk melanjutkan aktivitas pertambangan dan menginvestasi di Celah Timor.

Di samping persoalan mengenai ratifikasi, perusahaan-perusahaan perminyakan mengangkat ketidakpastian pajak yang akan dikenakan. Pemerintah Timor Lorosa'e merencanakan untuk mengenakan pajak yang lebih tinggi daripada pemerintah Australia. Perusahaan-perusahaan perminyakan menyerukan kepada pemerintah Australia dan Timor Lorosa'e untuk menyatukan kebijakan perpajakan mereka di Celah Timor.

Phillip Petroleum membela usaha penyambungan pipa gas ke Australia karena pendekatan yang paling tepat teknologi. Walaupun Timor Lorosa'e lebih dekat dengan ladang gas, Phillip mengatakan penyambungan pipa ke Australia adalah lebih mudah karena dasar laut tidak terlalu dalam.

Kesimpulan

Laut Timor adalah ajang pertarungan yang menggunakan kekuatan strategi politik dan ekonomi untuk mempromosikan kepentingan masing-masing.

Bagi pemerintah Australia, Laut Timor merupakan kesempatan yang harus diraih dengan menggunakan kekuatan politik, ekonomi dan teknologi yang mereka miliki. Negara ini sangat mengharapkan kerangka legal untuk memfasilitasi kesempatan kerja, investasi, pendapatan nasional, bisnis dan renovasi teknologi. Dengan alasan ini, Australia sedang menekan tetangganya yang kecil untuk meratifikasi Perjanjian Laut Timor secepatnya. Australia juga sedang menggunakan kekuatan politiknya dengan menarik diri dari Pengadilan Internasional dan proses arbitrase Konvensi Hukum Laut PBB untuk penyelesaian batas perairan laut.

Secara ekonomi, Australia sedang menggunakan kekuatan ekonominya untuk menawarkan pajak yang rendah kepada perusahaan-perusahaan yang mengeksplorasi minyak di Celah Timor. Kebijakan ini akan mempersulit Timor Lorosa'e untuk menyelesaikan kebijakan perpajakannya. Perusahaan-perusahaan minyak akan lebih mendekat ke Australia, yang memberi mereka keuntungan yang lebih besar daripada Timor Lorosa'e. Demikian pula, penalaran teknologi dari Australia dan Phillip Petroleum untuk membangun saluran pipa ke Australia tidak akan membantu Timor Lorosa'e.

Bagi Timor Lorosa'e, substansi persoalan Celah Timor adalah pengakuan kemerdekaan dan kedaulatan nasionalnya oleh masyarakat internasional, terlebih oleh dua negara tetangga kita, Australia dan Indonesia. Kemerdekaan berarti bahwa Timor Lorosa'e memiliki kekayaannya sendiri, dan punya hak untuk mengeksplorasi dan mempertahankan kekayaan itu sesuai dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan internasional. Kedaulatan nasional mengandung pengertian bahwa Timor Lorosa'e memiliki hak atas wilayah darat, laut dan udara sesuai dengan hukum nasional dan internasional.

Sebagai negara yang kecil dan miskin, Timor Lorosa'e harus mengandalkan pada kekuatan moral, termasuk solidaritas internasional, untuk mengimbangi kelebihan tetangganya yang besar kekuatannya, Australia. Timor Lorosa'e harus menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menghargai Timor Lorosa'e sebagai negara yang merdeka dan berdaulat yang sesuai hukum internasional memiliki hak atas wilayahnya sendiri. ❖



Berita Singkat. . .

Pada tanggal 11 Juli, **Komisi Tinggi Urusan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) melaporkan bahwa sekitar 1,910 anak-anak Timor Lorosa'e masih tetap terpisah dari orang tua mereka.** Dari jumlah itu, 821 berada di Timor Barat dan orangtua mereka berada di beberapa kota di Indonesia maupun di Timor Lorosa'e. Lima ratus empat anak lainnya berada di Timor Lorosa'e tetapi orangtua mereka berada di Indonesia. Terdapat juga 148 anak-anak berada di rumah-rumah pribadi dan 437 anak yang lain tinggal di berbagai yayasan dan panti asuhan. Menurut laporan, yayasan dan panti asuhan di Indonesia ini menampung anak-anak ini bertentangan dengan kemauan orangtua mereka, mengklaim bahwa mereka tidak percaya kepada dokumen UNHCR, surat yang ditandatangani orangtua dan dokumentasi video tentang orangtua. Octavio Soares, pendukung Indonesia yang fanatik adalah pemimpin kelompok Yayasan Hati yang menampung sekitar 150 anak-anak di Jawa. Soares mengatakan bahwa ia hanya akan menyerahkan anak-anak ini kepada orangtua mereka, bukan kepada UNHCR.

Pada hari yang sama, **Xanana Gusmão mengatakan bahwa dia tidak mendukung kemerdekaan Aceh atau Papua Barat (Irian Jaya).** "Dalam konteks politik, kami menghormati kedaulatan dan integritas Indonesia," kata presiden Timor Lorosa'e. "Tidak ada pemerintah di negara ini yang gegabah atau cukup bodoh untuk memberikan simpati atau dukungan kepada permintaan Papua atau Aceh untuk kemerdekaan," tambah Menteri Luar Negeri José Ramos Horta, "mereka harus menerima pemberian otonomi dari Jakarta - tawaran ini tulus."

Komentar LH: Para pemimpin politik Timor Lorosae harus mengikuti Konstitusi Timor Lorosa'e yang mengatakan, "Republik Demokratik Timor Lorosa'e akan mendukung perjuangan semua bangsa demi pembebasan nasional." Gerakan pembebasan didukung oleh aktivis dari seluruh dunia, termasuk mereka yang mempunyai perjuangan yang sama dengan Timor Lorosa'e. Rakyat dan para pemimpin Timor Lorosa'e juga harus mendukung hak menentukan nasib sendiri bangsa lain, termasuk Aceh dan Papua Barat. Boleh saja para pemimpin politik tidak membantu perjuangan bangsa lain, tetapi tidak seharusnya menentang perjuangan seperti itu.

Pada tanggal 17 Juli, **Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (KPKR) menyelenggarakan seminar dengan tema "Amnesti atau Rekonsiliasi", di Dili.** Seminar dibuka oleh Uskup Diosis Dili Carlos Filipe Belo mengulang pernyataan dalam himbauan pastoral bahwa "pengampunan dari pihak korban harus merupakan pra-syarat bagi pemberian amnesti". Uskup Belo mengatakan bahwa pemberian amnesti harus menghargai tuntutan korban, dan "Amnesti mungkin diberikan kepada pelaku kejahatan jika sebelumnya mengungkapkan kebenaran, mengakui kesalahan mereka; menyatakan penyesalan, dan bertobat serta berjanji tidak akan melakukan hal yang sama". Aniceto Neves dari Yayasan HAK menambahkan, "pemberian amnesti kepada para pelaku kejahatan melawan umat manusia di Timor Lorosa'e akan meniadakan kebenaran dan keadilan serta memelihara kekebalan hukum di masyarakat." Agio Pereira dari Kantor Presiden RDTL yang menyampaikan makalah dengan judul Pandangan Presiden Gusmão tentang Amnesti mengatakan, "Amnesti harus didiskusikan dalam konteks politik, yang berarti amnesti diberikan kepada mereka yang terlibat dalam kasus politik."

Sementara itu pada tanggal 18-19 Juli pada pertemuan puncak kelompok negara-negara African Caribbean Pacific (ACP), Xanana Gusmão menyerukan kepada negara-negara yang memiliki pendapatan rendah untuk mengurangi pengeluaran

uang untuk persenjataan. Dia juga menyerukan kepada negara-negara penghasil senjata untuk "melipatgandakan upaya mereka untuk mengurangi ekspor senjata ke negara-negara berkembang terutama ke wilayah-wilayah konflik." Presiden melaporkan bahwa pemerintah Timor Lorosa'e telah menghabiskan sekitar 30% anggaran nasional untuk sektor pendidikan dan kesehatan, jumlah yang barangkali meningkat pada tahun-tahun mendatang, sedangkan untuk anggaran militer akan menggunakan kurang dari 1%.

Pada tanggal 19 Juli, **Appropriations Committee Senat Amerika Serikat (komite yang berwenang menetapkan jumlah bantuan dan pihak yang diberi bantuan) mengesahkan kelanjutan pemberian pelatihan oleh Amerika Serikat untuk tentara Indonesia di bawah Program Pendidikan dan Pelatihan Militer Internasional (IMET).** IMET membawa perwira lebih dari 90 negara ke Amerika Serikat untuk pelatihan taktik, penggunaan senjata dan materi-materi lainnya. Sejak pembantaian Santa Cruz tahun 1991, Kongres Amerika telah melarang Indonesia mengikuti program ini. Pemerintah Clinton dan Bush serta militer Amerika Serikat tidak berhasil melobi pencabutan larangan ini, yang berkali-kali didukung kembali oleh Kongres dan sekarang telah menjadi undang-undang AS untuk hampir satu dasawarsa.

Setelah penghancuran Timor Lorosa'e pada tahun 1999 oleh TNI, Kongres meningkatkan pelarangan, menetapkan kondisi yang berhubungan dengan keadilan, pemulangan pengungsi, pertanggungjawaban dan kontrol sipil terhadap militer yang harus dipenuhi sebelum Amerika memulai pelatihan dan penjualan senjata untuk TNI. Walaupun persyaratan ini belum dipenuhi, "perang terhadap teror" secara global yang dipimpin oleh Amerika Serikat telah meningkatkan pengaruh militer Amerika di dalam pemerintah Amerika Serikat, dan dipimpin oleh Komite Senat untuk mengefektifkan pencabutan persyaratan yang diberlakukan IMET. Komite sepakat untuk melanjutkan pelarangan penjualan senjata ke Indonesia.

IMET untuk Indonesia tidak bisa dipulihkan jika seluruh anggota Kongres tidak menyetujui legislasi yang seperti itu. Para aktivis hak asasi manusia dan pendukung Timor Lorosa'e sedang bekerja keras menentang pemulihan bantuan militer, yang oleh militer Indonesia dipandang sebagai dukungan militer AS bagi kekebalan hukum (*impunity*) dan berlanjutnya pelanggaran hak asasi manusia. Menurut John Miller dari East Timor Action Network/US (ETAN/US, Jaringan Aksi bagi Timor Lorosa'e), "Komite itu telah mengabaikan keadilan bagi Timor Lorosa'e, hak asasi manusia dan nyawa ribuan orang Indonesia, dan kebijakan yang dapat mendorong reformasi dan demokratisasi sejati di Indonesia. Atas nama perang melawan terorisme, mereka tampaknya mengesahkan terorisasi yang berkelanjutan terhadap rakyat Indonesia yang dilakukan oleh TNI."

Pada tanggal 20 Juli selama kunjungan ke Indonesia, Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, Param Cumaraswamy menggolongkan sistem hukum negara tersebut sebagai sistem yang paling buruk di dunia. Dia juga mengatakan bahwa pemerintah Megawati Sukarnoputri kurang memiliki kemauan politik untuk menghilangkan Indonesia dari korupsi. Lagi pula, utusan PBB ini menyatakan kepedulian mengenai peradilan Timor Lorosa'e yang sedang berlangsung, khususnya menyangkut kenyataan bahwa banyak perwira TNI yang belum diadili.

Pada tanggal 23 Juli, **Timor Lorosa'e menjadi anggota Kelompok Bank Dunia dan IMF yang ke-184** ketika Perdana Menteri Mari Alkatiri menandatangani Pasal Kesepakatan di Washington, DC. Pada hari yang sama, Timor Lorosa'e menjadi anggota Bank Pembangunan Asia yang ke-61. Lagi pula untuk bergabung dengan institusi ini, Timor

Lorosa'e menandatangani dua kesepakatan hibah dengan Bank dunia, Program Pendukung Transisi sebesar US\$5 juta dan Kesepakatan Hibah Pelengkap dari Dana Perwalian untuk Timor Lorosa'e (TFET) untuk proyek Pengembangan Kapasitas Institusi Ekonomi. Satu minggu sebelumnya, Menteri Keuangan Madalena Boavista telah mengirim Presiden Bank Dunia James Wolfensohn surat tentang kebijakan pembangunan dan matriks tindakan yang secara ringkas menguraikan rencana pemerintah untuk menjalankan Rencana Pembangunan Nasional pada tahun mendatang.

Menteri Luar Negeri Indonesia mengumumkan pada tanggal 26 Juli bahwa akan dibuka kembali kasus Sander Thoenes, jurnalis Belanda yang dibunuh di Dili pada bulan September 1999. Jakarta telah menutup kasus ini pada bulan Juni, dan mengatakan bahwa tidak cukup bukti untuk menyusun dakwaan. Setelah menerima bukti yang baru dari pihak berwenang Belanda dan pada saat munculnya kritik internasional, Jakarta mengumumkan perubahan.

Pada bulan Juli, **19 U.S. Peace Corps Volunteers (Sukarelawan Korps Perdamaian Amerika Serikat) tiba di Timor Lorosa'e.** Setelah kursus bahasa Tetum selama satu bulan, mereka tinggal di Distrik Aileu, Manatuto, Liquiça dan Ermera, bekerja untuk promosi pemerintahan lokal dan perencanaan pelayanan kesehatan masyarakat. Korps Perdamaian adalah program pemerintah Amerika Serikat yang

telah berumur 40 tahun, dibiayai dan dibimbing oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dengan 7,000 sukarelawan di 70 negara berkembang. Tujuan utama dari Korps Perdamaian adalah untuk membangun citra Amerika Serikat yang baik di depan masyarakat, dengan tujuan kedua untuk membantu masyarakat di tempat mereka bekerja dan memberikan pengalaman pendidikan yang berharga bagi sukarelawan.

Para sukarelawan bukan profesional di bidangnya dan juga tidak punya pengetahuan tentang Timor Lorosa'e. Mereka adalah para amatir yang memiliki kemauan baik, diharapkan bekerja lebih dekat dengan masyarakat lokal untuk menentukan dan menjalankan misi mereka. Sukarelawan Korps Perdamaian di sini menerima biaya hidup sekitar US\$195 per bulan (ditambah biaya kesehatan dan akan menerima US\$6,000 setelah menyelesaikan tugas mereka), jauh lebih kecil dibandingkan yang diperoleh Sukarelawan PBB (UNV, UN Volunteers) atau Sukarelawan Internasional Australia (AVI, Australian Volunteers International). Korps Perdamaian menganggap kehadiran mereka dalam masyarakat itu bersifat permanen, sekalipun sebagai sukarelawan secara bergantian datang dan pergi. Mereka yang sekarang berada di Timor Lorosa'e telah berpengalaman selama dua tahun di negara-negara lain di mana Korps Perdamaian bertugas. Tahun depan, lebih dari 40 Sukarelawan Korps Perdamaian akan menggantikan 19 Sukarelawan yang pertama untuk masa dua tahun kerja, dan akan lebih banyak lagi yang akan datang pada tahun-tahun mendatang. ❖

Tinjauan Ringkas tentang Rencana Pembangunan Nasional *(bersambung dari halaman 16)*

Yang juga problematis adalah pembahasan dokumen mengenai kemiskinan di Timor Lorosa'e. Di antara faktor-faktor lain, dokumen tersebut juga menekankan kekerasan yang terjadi pada tahun 1999. Tetapi tidak menyebutkan tentang 23 tahun silam mengenai pendudukan Indonesia dan penjajahan Portugis selama berabad-abad. Dalam catatan yang berkaitan ketika membahas "keadilan, hak asasi dan kesetaraan gender" pada bagian mengenai hubungan luar negeri, RPN secara tepat melihat promosi rekonsiliasi sebagai sasaran penting. Anehnya, dokumen tersebut tidak menyebutkan perlunya peradilan hukum untuk kejahatan-kejahatan terhadap umat manusia dan kejahatan-kejahatan perang yang dilakukan terhadap orang-orang Timor Lorosa'e tahun 1975-1999. Namun demikian RPN mempunyai sebuah "prinsip pedoman" dari Departemen Luar Negeri Timor Lorosa'e "terciptanya suatu tata tertib ekonomi internasional yang mampu menjamin perdamaian dan keadilan di antara berbagai bangsa/negara", dokumen tersebut tidak membahas mengenai penyebab ketidakadilan dari sistem perdagangan global dan bagaimana hal itu digunakan untuk menciptakan dan mengabadikan kemiskinan untuk banyak orang.

Berdasarkan dokumen tersebut, tampaknya pemerintah Timor Lorosa'e pasrah terhadap *status quo* perekonomian global. RPN membahas mengenai kebutuhan akan "tenaga kerja yang disiplin" - istilah singkat untuk menyebut tenaga kerja yang upahnya rendah - walaupun menegaskan pentingnya hak buruh. Juga menganjurkan agar Timor Lorosa'e mengejar "daya saing internasional". Pada saat yang bersamaan, RPN berbicara tentang perlunya "keberkelanjutan" ekonomi selain penghapusan kemiskinan. Karena ciri perekonomian dan tenaga kerja Timor Lorosa'e saat ini, dan negeri-negeri dengan siapa harus bersaing untuk menarik modal asing, kata-kata ini berarti upah yang rendah dan pengaturan modal yang sangat lemah.

Kontradiksi-kontradiksi tersebut ada di dalam bagian mengenai produksi kopi. RPN memandang industri kopi "tidak layak" karena sangat rendahnya harga yang diterima para petani kopi dalam perekonomian global sekarang ini. Namun demikian, RPN menyarankan dan membayangkan pertumbuhan dramatis sektor

kopi Timor Lorosa'e pada tahun-tahun mendatang (dari US\$ 5,2 juta untuk ekspor tahun 2002 hingga US\$ 2,4 juta tahun 2007). Peningkatan ini dianggap terjadi melalui perbaikan mutu kopi Timor Lorosa'e dan perluasan produksi keseluruhan, serta pemasarannya kopi jenis yang diunggulkan. Tetapi strategi ini sama dengan yang dijalankan oleh produsen kopi di negara-negara lain. Dalam hal ini, setiap peningkatan produksi dan mutu kopi Timor Lorosa'e tidak selalu menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Sebagaimana dibahas dalam *Buletin La'o Hamutuk* Vol. 3, No.2-3, ada sejumlah keterbatasan yang bisa dicapai oleh strategi yang sepenuhnya berbasis nasional dalam meningkatkan kesejahteraan produsen kopi. Persoalan-persoalan yang bersangkutan paut dengan produksi kopi itu bersifat global, tidak semata nasional. Kalau pembangunan industri kopi tidak memasukkan analisis global dengan strategi yang sesuai, kopi akan tetap "tidak layak" bagi para petani kopi Timor Lorosa'e.

Rencana tersebut secara tepat berpendapat bahwa Timor Lorosa'e memerlukan landasan ekonomi yang beranekaragam. Pertanyaannya adalah, bagaimana Timor Lorosa'e mencapai tujuan tersebut? Apa saja peranan yang bisa dijalankan oleh bentuk-bentuk organisasi ekonomi alternatif - seperti koperasi dan inisiatif-inisiatif berbasis komunitas - dalam menggerakkan pembangunan? Pelajaran-pelajaran apa yang bisa diambil Timor Lorosa'e dari negara-negara lain dan gerakan-gerakan rakyat yang bekerja untuk keadilan ekonomi dan sosial? Bagaimana masyarakat Timor Lorosa'e bisa menjalankan proses perencanaan pembangunan yang benar-benar partisipatoris?

Inilah sebagian dari persoalan yang harus dipertimbangkan dalam proses strategi pembangunan nasional. Dalam hal ini, penting bagi masyarakat sipil Timor Lorosa'e untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh janji bahwa "rencana ini bukanlah akhir dari proses perencanaan dan pembangunan; ini adalah awal darinya." Akan tetapi seharusnya bukan sebuah awal yang membatasi, dan karenanya menghalangi, pembahasan di masa mendatang, tetapi yang memungkinkan dilakukannya analisis-analisis dan dibuatnya strategi-strategi yang secara mendasar berbeda. ❖

Konferensi para donor internasional di Dili pada bulan Mei lalu, UNTAET dan pemimpin politik Timor Lorosa'e mengeluarkan Rencana Pembangunan Nasional (RPN, National Development Plan) yang pertama. Hal ini ditandai sebagai "sebuah kejadian penting dalam sejarah dan pembangunan dari negara terbaru dunia," dengan 319 halaman. RPN dalam edisi bahasa Inggris membeberkan tujuan-tujuan pembangunan luas, strategi-strategi, dan pendekatan-pendekatan untuk jangka waktu lima tahun.

Menurut dokumen itu, RPN adalah "hasil karya rakyat Timor Lorosa'e" karena persiapannya yang melibatkan konsultasi dengan ribuan orang di 13 distrik. Dari konsultasi-konsultasi tersebut muncul dua tujuan utama pembangunan: 1) pengurangan kemiskinan di seluruh lapisan masyarakat dan di seluruh wilayah; 2) pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata, yang menghasilkan peningkatan standar kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan umum.

Tujuan-tujuan tersebut dapat dipuji karena di dalam perencanaannya menekankan pada kesetaraan gender sehingga perlunya perhatian pemerintah untuk memfokuskan sumber-sumbernya yang terbatas tersebut untuk kepentingan sosial. Tetapi setelah membaca dokumen tersebut menjadi jelas bahwa "rakyat Timor Lorosa'e" sesungguhnya hanya memainkan peran kecil dalam persiapan RPN. Penduduk wilayah ini pada umumnya hanya dibantu untuk menetapkan tujuan-tujuan umum, tetapi mereka tidak dibantu untuk menyusun hal-hal yang sangat penting untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Kelompok-kelompok kecil dari pelayanan umum Timor Lorosa'e, bersama dengan para konsultan dari Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF, International Monetary Fund), Amerika Serikat dan badan-badan internasional lainnya ikut terlibat dalam "perencanaan" dan menuangkannya dalam dokumen tersebut. Sementara NGO hanya sedikit yang dimintai pendapatnya dalam penulisan rancangan RPN tersebut. Sejumlah NGO hanya menerima beberapa bab (seluruhnya ditulis dalam bahasa Inggris) sebelum pertemuan umum akhir untuk mendiskusikan RPN, dan mereka hanya menerima dokumen-dokumen tersebut satu minggu sebelumnya. Pada umumnya masyarakat sipil tidak menunjukkan banyak perhatian terhadap RPN dan dengan jadwal yang ketat itu hanya ada sedikit waktu untuk membaca dokumen yang rumit yang ditulis dengan bahasa yang hanya dimengerti oleh sedikit orang Timor Lorosa'e.

Karena alasan-alasan tertentu tidaklah mengherankan kalau membaca dokumen tersebut seolah-olah diterbitkan untuk dan/atau oleh Bank Dunia dan IMF di negara-negara lain. Dengan demikian maka pemberantasan kemiskinan dan pembangunan menurut RPN akan dilaksanakan secara besar-besaran melalui sektor swasta melalui "sistem pasar bebas". RPN menjanjikan bahwa perkembangan tersebut "akan menjadi kunci utama pemberantasan kemiskinan untuk jangka menengah dan jangka panjang". Pemerintah hanya bisa memainkan peranan sebagai "fasilitator" secara luas melalui regulasi, pelaksanaan dan pembuatan strategi. Kenyataannya, RPN menyatakan bahwa pemerintah "akan menghindari keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan komersial kecuali jika ada bukti nyata bahwa sektor swasta tidak mampu

memberikan bahan-bahan pokok dan pelayanan-pelayanan".

Dari seluruh permasalahan yang berhubungan dengan apa yang disebut dengan sistem pasar bebas di negara-negara yang berpendapatan rendah - beranjak dari meningkatnya kesenjangan antara kaya dan miskin memperlemah akses terhadap pelayanan-pelayanan dasar pada tingkat-tingkat penting dari kontrol eksternal terhadap ekonomi, seringkali mengakibatkan ketidakstabilan yang berarti - misalnya ketergantungan yang berlebihan terhadap sektor swasta rupanya saran yang buruk. Namun demikian, RPN membayangkan bahwa di masa depan sektor swasta "peranannya akan semakin penting" (yang kelihatannya hendak melibatkan perusahaan-perusahaan pencari untung) dalam pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Jadi, dokumen tersebut sama sekali tidak mengatakan apa-apa mengenai pelayanan kesehatan gratis, namun demikian dokumen tersebut membahas tentang perlunya pemerintah menyediakan sebuah jaringan keselamatan sosial.

(Bersambung ke halaman 11)

Apa itu La'o Hamutuk?

La'o Hamutuk adalah sebuah organisasi gabungan Timor Lorosa'e-Internasional yang memantau, menganalisa dan melapor tentang kegiatan-kegiatan dari institusi-institusi internasional utama yang ada di Timor Lorosa'e dalam rangka pembangunan kembali sarana fisik, ekonomi dan sosial. *La'o Hamutuk* berkeyakinan bahwa masyarakat Timor Lorosa'e harus menjadi pengambil keputusan utama dalam proses merekonstruksi atau pembangunan dan proses ini harus demokratis dan transparan. *La'o Hamutuk* adalah sebuah organisasi independen yang bekerja untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat Timor Lorosa'e yang efektif dalam merekonstruksi dan membangun negara ini. Selain itu, *La'o Hamutuk* bekerja untuk memperbaiki komunikasi antara komunitas internasional dengan masyarakat Timor Lorosa'e. Staf *La'o Hamutuk* baik staf lokal maupun internasional mempunyai tanggung jawab yang sama dan memperoleh gaji dan keuntungan yang sama. Akhirnya, *La'o Hamutuk* menjadi pusat informasi dengan menyediakan berbagai bacaan tentang model pembangunan, pengalaman dan hasil praktek dan juga memfasilitasi hubungan solidaritas antara kelompok-kelompok di Timor Lorosa'e dengan kelompok-kelompok di luar negeri dengan tujuan untuk menciptakan model pembangunan alternatif.

Dengan dorongan semangat transparansi yang kuat, La'o Hamutuk mengharapkan anda untuk menghubungi kami jika anda mempunyai naskah-naskah dan atau informasi yang harus dibawakan pada perhatian masyarakat Timor Lorosa'e dan juga masyarakat internasional.